



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HANIAH**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **59437**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.157.000.000**

1. Tanah Seluas 4.516 m<sup>2</sup> di SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
2. Tanah Seluas 5.508 m<sup>2</sup> di MAMUJU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m<sup>2</sup>/144 m<sup>2</sup> di KOTA MAKASSAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 240 m<sup>2</sup> di TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah Seluas 1.990 m<sup>2</sup> di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
7. Tanah Seluas 1.891 m<sup>2</sup> di TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 181.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000



4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.343.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.343.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.